



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : 1. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia;
2. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia;
3. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 18 Juni 2012
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara : Membahas Persiapan Sumber Daya Manusia dalam rangka implementasi Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketua Rapat : dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKj/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : ... orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR-RI; ... orang izin

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR-RI menyampaikan apresiasi atas masukan-masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) mengenai kesiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), selanjutnya Komisi IX DPR-RI akan menyampaikan masukan-masukan tersebut pada Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
2. Komisi IX DPR-RI meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) untuk menyampaikan masukan yang disertai data-data aktual untuk menentukan jasa medik.
3. Komisi IX mendukung Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) untuk dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan BPJS.
4. Komisi IX meminta Tim Sosialisasi UU BPJS, yang telah dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi UU BPJS kepada seluruh stakeholder.
5. Komisi IX DPR-RI dapat memahami dan akan menindaklanjuti usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) antara lain :
 - Sistem pelayanan yang dipakai adalah sistem rujukan dengan **gate keeper**-nya adalah dokter praktek umum;
 - Penentuan tarif untuk jasa dokter/dokter spesialis dan kapitasi menggunakan tarif yang rasional dan terlebih dahulu dirundingkan dengan IDI;
 - Kerjasama lintas Departemen, antara lain, Kemenkes, Kemendagri, Kemenkeu dan lainnya dalam mengawasi dan mengakselerasi pelaksanaan SJSN.

Rapat diakhiri pukul 17.30 WIB

Jakarta, 18 Juni 2012
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,

